

POLA KOORDINASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Tika Juliani¹, Yudhanto², Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri³

Tikajuliani887@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Data on fires that occurred in Tanjung Pinang City within one year were 242 cases. The fire incidents in Tanjungpinang city consisted of house fire (including shop houses, workshop buildings, warehouses), forest fires, motor vehicle fires (cars, motorbikes, ships) and other fires (Trapofires or PLN substations, electricity trapos at home). On average there is an increase in the frequency of fires in 2017 and 2018 therefore it is necessary to increase awareness of fires that occur mainly forest and land fires. On average, in the last 5 years, there have been 28 house fires, 76 forest fires, 6 vehicle fires, and 8 others. This study aims to determine the pattern of coordination carried out by the Tanjungpinang Regional Disaster Management Agency given the increasing number of fires from year to year. This research is a descriptive qualitative research, data collection techniques conducted with interview, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques in this study are several components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research the coordination pattern conducted by the Tanjungpinang Regional Disaster Management Agency has been running optimally where BPBD has established coordination with various related agencies such as the Satkar PP Damkar, Basarnas, Police, Pdam, Kodim, Pu, and Social Services. In order to facilitate the service, a Damkar assistance post was built, for example in the Bukit Bestari area a water reservoir was built to serve fires around the site.

Keywords: Coordination, Fire

I. PENDAHULUAN

Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan peraturan Walikota tersebut diatas, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di badan penanggulangan bencana daerah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan, penetapan kebijakan, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Wilayah Kota Tanjungpinang
- Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kota Tanjungpinang memiliki tingkat kerawanan untuk bencana gelombang tinggi pada musim utara berada di Sebaok, pulau Basing, Sekatap dan Kelam Pagi dengan panjang garis pantainya yaitu 6.992,239m, kemudian untuk kerawanan gelombang musim selatan berada di pulau Penyengat, Dompok, Basing dan Sekatap yang memiliki panjang garis pantai 12.259,228m. untuk kerawanan bencana abrasi yang terjadi diwilayah selatan kota Tanjungpinang dengan tingkat kerawanan untuk bencana sidimentasi yaitu kelas rawan dengan garis pantai 14110.316 dan kelas sangat rawan 171601.126 yang posisinya berada didekat dengan keberadaan lahan tambang.

Kota Tanjungpinang merupakan satu daerah yang wilayahnya dikelilingi oleh laut sehingga memiliki potensi untuk terjadinya bencana pesisir seperti gelombang tinggi, abrasi dan sidimentasi, banjir rob, angin puting beliung. Kawasan rawan bencana gelombang pasang yang menghadap kearah laut Cina selatan. Selain terdapat kawasan rawan bencana banjir, petir dan rawan gelombang pasang di kota Tanjungpinang juga terdapat daerah rawan angin puting beliung dan kawasan rawan longsor.

Tabel 1. Rekapitulasi Kebakaran Bulan Januari s/d Oktober 2019

1. Bulan	2. Jumlah Kejadian Kebakaran
(1) Januari 2019	(1) 22 Kejadian
(2) Februari 2019	(2) 44 Kejadian
(3) Maret 2019	(3) 74 Kejadian
(4) April 2019	(4) 10 Kejadian
(5) Mei 2019	(5) 2 Kejadian
(6) Juni 2019	(6) 14 Kejadian
(7) Juli 2019	(7) 12 Kejadian
(8) Agustus 2019	(8) 35 Kejadian
(9) September 2019	(9) 33 Kejadian
(10)Oktober 2019	(10)3 Kejadian

Sumber: Satpol PP Dan Damkar, 2019

Tabel 2. Tabel 1.2 Frekuensi Kebakaran

Tahun	Rumah	Hutan	Kendaraan	Lain-Lain	Total
2014	22	51	3	9	85
2015	22	65	1	8	96
2016	36	11	11	11	69
2017	40	102	9	11	162
2018	18	151	6	2	177
Rata-rata	28	76	6	8	118

Sumber: Satpol PP dan Damkar, 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa terjadi peningkatan frekuensi kebakaran pada tahun 2017 dan 2018 oleh karena itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran yang terjadi terutama kebakaran hutan/ lahan. Rata-rata 5 tahun terakhir kebakaran rumah sebanyak 28 kali, kebakaran hutan 76 kali, kebakaran kendaraan 6 kali, dan kebakaran lain-lain 8 kali.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mendapatkan kebakaran dikota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pola Koordinasi Penanggulangan Kebakaran yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang” dalam menanggulangi kebakaran yang terjadi di Kota Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi informen dalam penelitian ini sebanyak 11 orang.

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala BPBD Kota Tanjungpinang	1
2	Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang	1
3	Kepala Damkar Kota Tanjungpinang	1
4	Kepala Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan	
5	Kepala seksi kedaruratan logistic	1
6	Kepala seksi rehabilitas dan rekonstruksi	1
7	Pegawai dibidang Damkar	1
8	Anggota masyarakat yang menerima pelayanan	5
TOTAL		11

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian mengenai bagaimana Pola Koordinasi Penanggulangan Kebakaran yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang melalui proses komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, insentif koordinasi, dan feedback Untuk Koordinasi Berikutnya terhadap penanggulangann kebakaran Kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan dengan maksimal.

Tabel 6. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Deasy Ariyanto, 2018	Koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas badan penanggulangan bencana daerah di Ciamis	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan metode penelitian kualitatif• Membahas peran pemerintah dalam kota layak anak	<ul style="list-style-type: none">• Fokus penelitian, membahas dalam mewujudkan kota layak anak• Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dengan melalui pendekatan

				<p>bottom-up, top-down, dan kombinasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Provinsi Riau Kabupaten Siak.
2.	<p>Penelitian oleh Amni Zarkasyi Rahman, 2017</p>	<p>Kapasitas daerah Banjarnegara dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas kota layak anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, membahas hak sipil anak yang terdapat dalam kota layak anak • Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis operatinonal component • Penelitian ini menggunakan teori Harold D. Laswell (Effendy 2005:10) • Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru
3.	<p>Penelitian oleh Rudi Rahmad Nugraha, 2015</p>	<p>Optimalisasi koordinasi penanggulan bencana alam dan inflikasi terhadap ketahan wilayah (studi kasus dikecamatan cangkringan kabupaten seleman Yogyakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas kota layak anak • Lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, membahas implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak • Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Ditinjau dari Pola Koordinasi Penanggulangan Kebakaran terdapat enam indikator koordinasi menurut ndraha (2007:24) yaitu sebagai berikut:

1. Deskripsi Indikator Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Adapun pengukurannya sebagai berikut :

1. Ada tidaknya informasi
2. Ada tidaknya jalur informasi
3. Ada tidaknya teknologi informasi

Dalam menjalankan tugas BPBD Kota Tanjungpinang selalu berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait dalam menanggulangi kebakaran, diantaranya BPBD Kota Tanjungpinang berkomunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang mengingat BPBD sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir segala macam bentuk bencana baik bencana yang terjadi didarat maupun dilaut.

2. Deskripsi Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siaman, bangun, (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya, rakyat telah sadar akan politik. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan terhadap koordinasi
2. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi

3. Deskripsi Indikator Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. Ada tidaknya penetapan jadwal
2. Ada tidaknya pejabat yang berwenang yang terlibat
3. Ada tidaknya ahli dari masing-masing bidang yang terlibat

4. Deskripsi Indikator Kesepakatan Dan Komitmen

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Komitmen adalah sebuah pengakuan seutuhnya dan sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam seseorang. Adapun pengukurannya sebagai berikut

1. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
2. Ada tidaknya pelaksanaan kesepakatan

5. Deskripsi Indikator Insentif Koordinasi

Insentif koordinasi adalah suatu sarana memotifasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. Ada tidaknya penetapan sanksi.
2. Ada tidaknya pemberian sanksi bagi yang melanggar kesepakatan.

6. Deskripsi Indikator Feedback Untuk Koordinasi Berikutnya

Insentif koordinasi adalah suatu sarana memotifasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. Ada tidaknya penetapan sanksi.

2. Ada tidaknya pemberian sanksi bagi yang melanggar kesepakatan.

7. Deskripsi Indikator Feedback Untuk Koordinasi Berikutnya

Feedback untuk proses koordinasi berikutnya tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan (penerima pesan) ketika seorang komunikator (pemberi pesan) sedang menyampaikan pesannya. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

1. Ada tidaknya complain terhadap kesepakatan.
2. Ada tidaknya evaluasi terhadap kesepakatan.
3. Ada tidaknya perubahan kesepakatan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pola Koordinasi Penanggulangan Kebakaran yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Tanjungpinang belum terlaksana sebagai mana mestinya, hal ini dapat dilihat pada kesimpulan berikut ini:

a. Indikator komunikasi

Pola koordinasi penanggulangan kebakaran efektif dilakukan melalui komunikasi kepada stakeholder terkait. BPBD merupakan instansi koordinasi penanggulangan bencana secara umum melakukan koordinasi dengan Satpol PP Damkar, Basarnas, Kepolisian, Pdam, Kodim, Pu, dan Dinas Sosial.

b. Indikator Kesadaran pentingnya koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi dari pihak BPBD dan Damkar Satpol PP maupun pihak-pihak terkait lainnya guna penanggulangan bencana kebakaran harus dilakukan secara serius terutama pasca kebakaran untuk merehabilitasi dan merekonstruksi bangunan/gedung pasca kebakaran.

c. Indikator Kompetensi partisipan

Indikator kompetensi sudah dilakukan jadwal rapat rutin minimal 1 bulan sekali dengan menghadirkan pejabat yang terkait untuk melakukan koordinasi guna mengevaluasi pasca bencana. Pegawai BPBD maupun Damkar harus kompetensi didalam menjalankan tugasnya melalui pelatihan rutin yang dilakukan oleh BPBD Pusat.

d. Indikator kesepakatan dan komitmen

Pihak BPBD dan Satpol PP Damkar selalu melakukan kesepakatan dengan melakukan Mou dalam penanggulangan bencana kebakaran berkomitmen dengan pihak stakeholder terkait seperti PLN, PDAM, PU, Dinas Sosial, Polisi.

e. Indikator insentif koordinasi

Insentif koordinasi khususnya bagi pegawai yang membidangi kebakaran diberikan uang insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; insentif yang diberikan berupa uang laok pauk karena jam kerja berbeda dengan dinas instansi lain.

f. Indikator feedback untuk koordinasi berikutnya

Pihak Damkar selalu datang terlambat karena rumah sudah hangus baru datang ke lokasi kebakaran; dikonfirmasi bahwa pihak Damkar paling lambat 15 menit datang di lokasi. Untuk mempercepat pelayanan dibangun Pos bantuan Damkar misalnya di daerah Bukit Bestari dibangun tempat penampungan air untuk melayani kebakaran disekitar lokasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa masih ada permasalahan terkait pola koordinasi penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah kota tanjungpinang. Maka dari itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator komunikasi

Hendaknya ditingkatkan lagi pola komunikasi didalam melakukan koordinasi dengan SatpolPP Damkar; Basarnas; Kepolisian, Pdam, Kodim, Pu, Dinas Sosial.

2. Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Hendaknya ditingkatkan pola kesadarann pentingnya koordinasi pasca kebakaran untuk merehabilitasi dan merekonstruksi bangunan/gedung pasca kebakaran.

3. Indikator Kompetensi partisipan

Hendaknya pegawai Damkar harus ditingkatkan kompetensi dan keahlian mengingat Tanjungpinang sebagai ibukota telah mulai bangunan-bangunan bertingkat seperti pemadam 1 pemadam 2 dan pemadam 3.

4. Indikator kesepakatan dan komitmen

Hendaknya Pihak BPBD dan Satpol Pp Damkar selalu mengevaluasi dengan pihak stakeholder terkait seperti PLN, PDAM, PU, Dinas Sosial dan Polisi sehingga upaya pemadam kebakaran bisa lebih optimal.

5. Indikator insentif koordinasi

Hendaknya Pemerintah Kota Tanjungpinang memperhatikan insentif yang diberikan berupa uang laok pauk kepada petugas Damkar.

6. Indikator feedback untuk koordinasi berikutnya

Hendaknya Pos bantuan Damkar dibangun minimal di setiap kecamatan untuk mengantisipasi dampak negatif terjadinya kebakaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abhas. 2012. Manajemen Bencana. Bina Aksara. Jakarta
- Affeltrnger, B., Alcedo., Amman, W.J., Arnold, M., 2006. Living with Risk, "A Global Review of Disaster Reduction Initiatives". Buku terjemahan oleh MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia), Jakarta.
- Baiquni, 2006, Strategi Penghidupan Di Masa Krisis, Ideas Media Yogyakarta Tahun 2007
- Bryson, M, John. 2007. Perencanaan Strategis Bagi Oraganisasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haifani, 2008, Manajemen Risiko Bencana (Studi Kasus Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006). Jurnal Pusat pengkajian Sistem dan Teknologi Keselamatan
- IDEP, 2007. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Edisi ke-2, Bali : Yayasan IDEP
- Kaswan. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Berdaya Saing Organisasi. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Petrasawacana, 2007. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jakarta : wordpress.com
- Ramli S., 2010 Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran, Dian Ralyat, Jakarta.2009
- SNI 03-1746-1998 Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk Penyelamatan Terhadap Kebakaran Pada Bangunan Gedung
- Tearfund, 2006, Mainstreaming Disaster Risk Reduction, A Tool for Development Organisation, Tearfund, 100 Church Road, Teddington, Middlesex, TW11 8QE, UK

Wibowo. 2007. Manajemen Perubahan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

Amni Zarkasyi Rahman. 2017. Kapasitas daerah Banjarnegara dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor

Budi Harsoyo. 2013. Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan

Mochamad Chazienul Ulum. 2013. Governance dan capacity building dalam manajemen bencana banjir di Indonesia

Rhesa Wibowo Putra. 2015. Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah di kabupaten Kutai Barat

Yunita Arisanti dan Putut Winsu Nugroho. 2018. Strategi manajemen bencana di Kabupaten Magelang.

DOKUMEN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPBD : Tanjungpinang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2013. Pemetaan Daerah Bencana. BPBD : Tanjungpinang
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang

Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.